

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang eksistensi proyek.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk yang besar tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak terjadi pengangguran, terlebih semenjak adanya krisis moneter. Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami permasalahan yang kompleks, sehingga yang terkadang terjadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kondisi demikian menimbulkan kesenjangan sosial dan tingkat kriminalitas semakin tinggi. Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat, dan melihat sarana dan wadah untuk pembinaan bagi para tahanan dan narapidana yang ada di Indonesia sekarang ini tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang meningkat. Melihat hal tersebut maka kebutuhan suatu Lembaga Perasyarakatan sebagai bagian dari sistim peradilan ternyata memiliki fungsi yang strategis. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil akhir dari pembinaan para narapidana, dimana apabila seorang bekas narapidana menjadi anggota masyarakat yang taat hukum maka disimpulkan bahwa Lembaga Perasyarakatan berhasil menjalankan fungsinya demikian pula dengan sebaliknya jika mantan narapidana menjadi penjahat kembali, maka Lembaga Perasyarakatan menjadi sasaran kegagalan.

Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum lebih dikenal dengan Penjara, pada awalnya merupakan berfungsi sebagai cara untuk “balas dendam” kepada

sebagian masyarakat yang melakukan kejahatan, dengan cara dipisahkan atau dijauhkan dari kehidupan masyarakat. *Adannya penjara karena adanya system pidana hilang kemerdekaan. Kewajiban penjara yang paling penting adalah melaksanakan pidana hilang kemerdekaan (Politik Pendjara Nasional – Mr. M.A Koesnoen S.h., 1961).* Perkembangan fungsi penjara selanjutnya adalah sebagai alat perlindungan masyarakat dari kejahatan yang dilakukan sebagian masyarakat, hal ini masih terikat dengan fungsi awal dari adanya penjara. Dalam perkembangannya kemudian, para pelaku kejahatan (narapidana) dijadikan sebagai masyarakat lapis kedua, dengan melihat fungsi penjara tersebut sebagai pembalasan dendam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari para pelaku kejahatan. Keadaan demikian membuat para mantan narapidana menjadi kesulitan untuk kembali dalam kehidupan masyarakat setelah menjalani hukumannya, dan semakin tidak diterimanya mereka, akan membuat mereka dendam terhadap masyarakat yang berdampak untuk melakukan kejahatan lagi, sehingga penjara menjadi “*menjadikan menjahatkan penjahat*” (DR. Sahardjo – *Sejarah dan Azas-azas Penology/ Pemasyarakatan*), sehingga Lembaga Perasyarakatan dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya.

Posisi Lembaga Perasyarakatan yang strategis dalam sistim peradilan pidana dirasa cukup relevan untuk dikedepankan, mengingat Lembaga Perasyarakatan sebagai satu-satunya instansi atau lembaga yang paling berhubungan langsung dengan pembinaan pelanggar hukum.

I.2. Latar Belakang Permasalahan.

Melihat posisi dan fungsi suatu Lembaga Perasyarakatan tersebut, menjadikan suatu Lembaga Perasyarakatan harus memiliki bentuk bangunan yang dapat merealisasikan kebutuhan akan pembinaan para narapidana. *Bangunan lembaga pemasyarakatan pada umumnya bekas peninggalan jaman belanda dan dalam keadaan rusak. Keadaan tata ruang di lembaga-lembaga pemasyarakatan, terutama ruangan untuk para narapidana, kurang memperhatikan martabat narapidana sebagai manusia (Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan – BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975).*

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, secara garis besar seperti yang terurai diatas. Lembaga Pemasyarakatan di Yogyakarta adalah merupakan bangunan peninggalan Pemerintahan Belanda. Bangunan tersebut pada awalnya merupakan benteng pertahanan untuk menghadapi pemerintahan Kasultanan Pakualaman, yang pada perkembangan selanjutnya Pemerintahan Belanda mengalih fungsikan benteng pertahanan tersebut menjadi tempat penahanan musuh yang fungsi utamanya sebagai tempat untuk penyiksaan, penginterogasian, penahanan, dan balas dendam terhadap para pejuang bangsa Indonesia yang dicurigai atau tertangkap. Melihat kondisi fisik Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka nilai “Pemasyarakatan” yang berlaku saat ini menemui hambatan – hambatan dalam proses pembinaan para narapidana (secara fisik) yang diinginkan. Hambatan – hambatan tersebut secara lebih terinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- Keadaan fisik ruang dan bangunan pada bangunan di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya, kurang memperhatikan kesehatan para warga binaan.
- Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang pada umumnya belum sesuai dengan kebutuhan pembinaan para narapidana.
- Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya belum memiliki unsur – unsur fisik bangunan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunan.

Melihat hal tersebut, bentuk bangunan sel tahanan dan narapidana tiap blok, dirasa tidak sesuai dan menimbulkan kondisi tidak sehat dengan jumlah penghuni yang semakin meningkat, dikarenakan bangunan yang telah ada tidak mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Sehingga terkadang banyak terjangkit penyakit yang menular dikarenakan tidak lancarnya aliran udara di dalam tiap bangunan sel. Para penghuni memang sedang menjalani hukuman atas perbuatan mereka, tetapi mereka juga layak mendapatkan tempat yang layak dan higienis. Keadaan demikian tentunya sudah tidak sesuai dengan perjalanan sejarah Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.

I.3. Permasalahan.

Bagaimana wujud rancangan bangunan Lembaga Pemasyarakatan di Yogyakarta sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang sehat dan aman, melalui perancangan ruang yang mengakomodasi kebutuhan optimum pencahayaan dan penghawaan.

I.4. Tujuan dan Sasaran.

I.4.1. Tujuan :

Mewujudkan rancangan Lembaga Perumahan yang sesuai dengan tuntutan fungsi dengan cara menghasilkan bentuk bangunan yang lebih menjamin kesehatan bagi para penghuni lembaga perumahan.

I.4.2. Sasaran :

1. Perancangan ruang blok sel para narapidana dan fasilitas lainnya dengan mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami.
2. Peletakan massa bangunan terhadap faktor iklim penghawaan dan pencahayaan.

I.5. Pendekatan studi.

Dengan dasar tujuan akhir yang ingin dicapai, maka materi studi dibatasi pada masalah-masalah yang nantinya diharapkan dapat dijadikan faktor-faktor perencanaan fisik. Materi studi lebih ditekankan pada pengoptimalan penghawaan dan pencahayaan pada bangunan di Lembaga Perumahan, yang meliputi pengaturan tata letak ruang, dimensi ruang, dimensi bukaan, elemen-elemen bangunan suatu Lembaga Perumahan dan pendekatan bentuk wujud perancangan terhadap potensi site yang ada.

I.6. Metode pembahasan.

- Melakukan studi banding di LP Wrogunan Yogyakarta, melalui observasi secara langsung, stay in, sebagai bahan analisis dalam usaha pemecahan masalah.
- Melakukan sintesa terhadap kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh sebagai sebuah konsep perencanaan dan perancangan.

I.7. Sistematika Pembahasan.

1. Pengungkapan tentang latar belakang eksistensi proyek, latar belakang permasalahan, permasalahan, penekanan disain, tujuan dan sasaran, pendekatan studi, dan metode pembahasan.
2. Kajian teori tentang tinjauan umum Lembaga Pemasarakatan dan penghawaan dan pencahayaan.
3. Pendekatan dan analisis.
4. Konsep dasar perencanaan dan perancangan.